

BAB I

PENDAHULUAN

Terlaksananya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor: 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang diterapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Padang Lawas, yang didasari dari peraturan pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor: 18 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas	1 Orang
a. Sekretaris	1 Orang
- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 Orang
- Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	1 Orang
- Kepala Seksi Informasi Publik	1 Orang
- Kepala Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik	1 Orang
- Kepala Seksi Telekomunikasi	1 Orang
c. Kepala Bidang E-Government	1 Orang
- Kepala Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi	1 Orang
- Kepala Seksi Pemberdayaan Aplikasi	1 Orang
- Kepala Seksi Keamanan Informasi	1 Orang
d. Kepala Bidang Persandian dan Statistik	1 Orang
- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	1 Orang
- Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik	1 Orang
- Kepala Seksi Persandian	1 Orang

Dengan keadaan struktur organisasi yang ada maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 bersifat Naratif dan sistematis sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Rencana Strategik
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
BAB IV	Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.a Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas

Untuk Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika telah dapat menyusun perencanaan strategik yang merupakan rangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar dibuat secara bersama-sama antara keseluruhan komponen organisasi yang diimplementasikan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.

Rencana strategik yang disusun ini mengikuti pola sebagai berikut :



1. VISI

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Padang Lawas terpilih tahun 2014 – 2019 sesuai dengan masa bakti Bupati Padang Lawas dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan Visi sebagaimana berikut:

“Mewujudkan Diskominfo Sebagai Pusat Komunikasi dan Informatika Daerah”

2. MISI

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu;

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis;
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat;
5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab;
6. Meningkatkan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan informatika yang handal.

Sesuai dengan Visi tersebut diatas rencana penggunaan Misi adalah merupakan pernyataan apa yang harus di capai dengan kegiatan-kegiatan spesifik yang yang harus direncanakan, apabila Visi dipandang sebagai pembeli inspirasi sekaligus motifasi maka misi dipandang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen.

Misi tersebut dititikberatkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung program – program Pemerintah Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas. Adapun Visi Kabupaten Padang Lawas yaitu : **“Mewujudkan Padang Lawas yang Beriman, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan berbudaya dalam Sistem Pemerintahan yang Bersih.**

Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel transparan secara efisien dan efektif;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan infrastrukturnya;
3. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;
5. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan antar maupun intra umat beragama;
6. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni, sosial dan kesatuan bangsa, pembinaan minat dan bakat generasi muda, kerja sama sinergi dengan semua institusi kemasyarakatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi, urusan Pemerintahan Daerah di bidang E-Government, dan urusan Pemerintah Daerah di bidang Persandian dan Statistik. Dalam hal ini Dinas komunikasi dan Informatika berperan dalam pencapaian Visi Kepala daerah melalui Misi ke-2 (dua).

II.b TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PADANG LAWAS

Untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Padang Lawas terpilih tahun 2014 – 2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan

Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan SKPD;
2. Meningkatnya pelayanan Komunikasi dan Informasi.

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan SKPD;
2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas;
3. Meningkatnya komunikasi dan informasi Pembangunan Daerah;
4. Meningkatnya infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Meningkatnya keamanan sistem persandian;
6. Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu;

II.c Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bagaimana cara Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

II.d Rencana Kerja Tahun 2017

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis disusun pula suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap Indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2017 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas sepenuhnya dapat ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 ini.

Dengan berubahnya struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika maka Dinas komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian. Namun demikian, pada tahun 2019 untuk urusan persandian belum dianggarkan kegiatan tersendiri, karena mengacu pada tahun sebelumnya bahwa urusan persandian kegiatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya, selama proses penyesuaian kegiatan pada urusan persandian, maka anggaran seperti Perjalanan Dinas, maupun pemeliharaan alat akan melekat pada kegiatan di sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Penyediaan Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
 - l. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan;
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Besarta Kelengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur;
 - a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - a. Operasional PPID
 - b. Operasional Website Pemkab Palas
 - c. Pengembangan Jaringan Komunikasi Daerah
 - d. Pengembangan Data Center Kab. Padang Lawas
 - e. Pembangunan Command Center Kabupaten Padang Lawas
 - f. Pembinaan bagi Warung Internet (Warnet)
 - g. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 - h. Perlombaan KIM dan PETRA Tingkat Kabupaten dan Provinsi
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
 - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik

Urusan Statistik dan Persandian

1. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah;
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - b. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
 - c. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB
 - d. Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB
 - e. Survey dan Monitoring Menara Telekomunikasi
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah;
 - a. Sosialisasi Keamanan Informasi dan Persandian Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.a INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran bagi setiap kegiatan diukur dari capaian indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), sasaran (objective).

A. ASPEK-ASPEK KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sebagai kontribusi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar Rp. 375.000.000,00 yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

2. BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG

Sebagai implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas, pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika guna pelaksanaan program sebagaimana yang tertuang dalam rencana Strategi tersebut diatas sebagai bagian Integral dari Program Pemerintah Daerah. Adapun anggaran yang dialokasikan tersebut terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.171.421.548,00
2. Belanja Langsung	Rp.	<u>4.159.866.500,00</u>
Jumlah	Rp.	5.331.288.048,00

a. Belanja Tidak Langsung

Adapun komponen belanja tidak langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Dana dalam DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	Gaji dan Tunjangan PNS	701.921.548,00	689.193.880,00	12.727.668,00
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	469,500,000.00	451.500.000.00	18.000.000,00
Jumlah		1.171.421.548,00	1.140.693.880,00	30.727.668,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017 mencapai 97.38%.

b. Belanja Langsung

Adapun Pengukuran Kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas Kinerja selanjutnya dapat dijelaskan bahwa disamping dana belanja tidak langsung, juga terdapat dana belanja langsung yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a). Penyediaan Jasa surat menyurat

Inputs:
 Rp. 8.400.000,00

Autputs:
 Tersedianya dana pelaksanaan kegiatan penyelesaian pertanggungjawaban Administrasi Perkantoran dan Keuangan

Autcomes:
 Tersampainya surat-surat dinas

Benefits:
 terlaksananya kegiatan penyelesaian pertanggungjawaban Administrasi Perkantoran dan Keuangan

Impacts:
 terselesaikannya Kegiatan penyelesaian pertanggungjawaban Administrasi Perkantoran dan Keuangan

b). Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Inputs:

Rp. 40.200.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana Pembayaran Pemakaian Bulanan Listrik dan Bahan Bakar Generator Set

Autcomes:

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Bahan Bakar Generator Set pada Kantor

Benefits:

Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Bahan Bakar Generator Set

Impacts:

Tercapainya efisiensi Pemakaian Listrik dan Bahan Bakar Generator Set

c). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Inputs:

Rp. 94.600.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Autcomes:

Terbayarnya kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Benefits:

Tercapaiannya Efisiensi Pemakaian Dana

Impacts:

Pelaksanaan Tugas yang tepat waktu dan tanpa kendala di lapangan

d). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Inputs:

Rp. 182.140.000,00

Autputs:

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Autcomes:

Terpertanggung jawabkannya Pemakaian Dana

Benefits:

Tercapaiannya Efisiensi Pemakaian Dana

Impacts:
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan

e). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Inputs:
Rp. 47.000.000,00

Outputs:
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Alat dan Bahan Pembersih

Autcomes:
Terselenggaranya Kebersihan Kantor

Benefits:
Tercapainya Peningkatan Kebersihan Kantor

Impacts:
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan Kantor

f). Penyediaan Alat Tulis Kantor

Inputs:
Rp. 32.937.000,00

Outputs:
Tersedianya Alat Tulis Kantor

Autcomes:
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor

Benefits:
Tersedianya Alat Tulis Kantor

Impacts:
Tercapainya Efisiensi dan Aktifitas Kerja

g). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs:
Rp. 15.000.000,00

Outputs:
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Autcomes:
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor

Benefits:
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Impacts:
Tercapainya Efisiensi dan Aktifitas Kerja

h). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Inputs:
Rp. 5.000.000,00

Outputs:
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor

Autcomes:
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor

Benefits:
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor

Impacts:
Terpenuhi Kebutuhan/ Penggantian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

i). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Inputs:
Rp. 223.000.000.00

Outputs:
tersedianya Dana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Autcomes:
Perlengkapan dan peralatan Kantor penunjang pekerjaan memadai

Benefits:
Tercapaiannya Efisiensi pelaksanaan pekerjaan pegawai

Impacts:
Tugas-tugas pegawai terlaksanakan dengan cepat, tepat dan baik

j). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Inputs:
Rp. 36.624.000.00

Outputs:
tersedianya Dana Penyediaan bahan bacaan berupa koran, majalah dan Buku

Autcomes:
bahan bacaan berupa koran, majalah dan Buku yang memadai

Benefits:
Tercapaiannya pengetahuan dan informasi yang lebih uptodate dan terpercaya

Impacts:
Tugas-tugas pegawai terlaksanakan dengan cepat, tepat dan baik

k). Penyediaan makanan dan minuman

Inputs:

Rp. 22.680.000,00

Autputs:

Tersedianya Biaya untuk memenuhi kebutuhan kantor dan tamu

Autcomes:

Makan minum kantor terpenuhi sesuai kebutuhan yang ada

Benefits:

Pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu

Impacts:

Meningkatnya kinerja aparatur

l). Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Inputs:

Rp. 538.576.000,00

Autputs:

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Autcomes:

Terselenggaranya Pengkoordinasian dan Konsultasi Keluar Daerah

Benefits:

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah untuk Eselon II, Eselon III/Gol IV, Eselon IV/ Gol III dan Gol II dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran

Impacts:

Penyelenggaraan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi berjalan dengan baik

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a). Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Inputs:

Rp. 156.100.000,00

Autputs:

tersedianya Dana Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Autcomes:

Perlengkapan gedung kantor berupa pembuatan interior ruangan, walpaper dan partisi dan lemari arsip.

Benefits:

Penataan ruangan yang lebih baik dan nyaman

Impacts:

Pencapaian kenyamanan kerja yang lebih baik

b). Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Inputs:

Rp. 60.000.000,-

Autputs:

Tersedianya Biaya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Autcomes:

Terpenuhinya kenyamanan ruangan tempat kerja aparatur

Benefits:

Pelayanan Berjalan dengan maksimal

Impacts:

Semangat kerja Pegawai semakin tinggi

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a). Pendidikan dan Pelatihan Formal

Inputs:

Rp. 120.000.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana Bimbingan Teknis Kelembagaan

Autcomes:

Terikutinya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kelembagaan

Benefits:

Bertambahnya Pengetahuan Aparatur

Impacts:

Terciptanya SDM yang lebih baik

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a). penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Inputs:

Rp. 8.000.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan

Autcomes:

Penyusunan Laporan Keuangan berjalan dengan baik dan tepat waktu

Benefits:

Laporan keuangan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu

Impacts:

Data dapat di pergunakan oleh pihak yang membutuhkan

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a). Operasional Website Pemkab Palas

Inputs:

Rp. 96.000.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana Pelaksanaan Operasional Website Pemkab Palas

Autcomes:

Tersedianya website dengan baik

Benefits:

Lancarnya informasi di website

Impacts:

Website dapat di kunjungi

b). Pengembangan Jaringan Komuikasi Daerah

Inputs:

Rp. 906.769.500,00

Autputs:

Tersedianya Dana untuk melaksanakan Pengembangan Jaringan Komuikasi Daerah

Autcomes:

Terhubungnya jaringan komunikasi

Benefits:

Lancarnya arus informasi

Impacts:

Terkoordinasi informasi

c). Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Inputs:

Rp. 250.000.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana dalam rangka Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Autcomes:

Sampainya informasi pengaduan

Benefits:

Terkelolanya informasi pengaduan

Impacts:

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan

d). Survey dan Monitoring Menara Telekomunikasi

Inputs:

Rp. 135.000.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana dalam rangka Survey dan Monitoring Menara Telekomunikasi

Autcomes:

Terkelolanya menara telekomunikasi

Benefits:

Meningkatnya pengelolaan menara telekomunikasi

Impacts:

Lancarnya tata kelola menara telekomunikasi

e). Pembangunan Data Center

Inputs:

Rp. 876.000.000,00

Autputs:

Tersedianya Dana untuk Pembangunan Data Center - server induk berbasis jaringan

Autcomes:

Layanan jaringan Internet dan server berjalan dengan baik

Benefits:

Pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis jaringan internet dapat dikelola dengan baik

Impacts:

Efisien dan efektifnya pelaksanaan pemerintahan

f). Pelatihan Pejabat Penghubung SP4N

Inputs:

Rp. 150.000.000,00

Autputs:

Jumlah Informasi Pelaporan Masyarakat

Autcomes:

Meningkatnya Pengaduan Pelayanan Masyarakat guna Menaikkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan

Benefits:
Permasalahan di masyarakat dapat diketahui dan dikelola dengan baik

Impacts:
Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah

6. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

a). Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Inputs:
Rp. 21.900.000,00

Outputs:
Terlaksananya kegiatan PPID

Autcomes:
Lancarnya operasional PPID

Benefits:
Meningkatnya pelayanan informasi

Impacts:
Masyarakat mudah memperoleh informasi

b). Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Inputs:
Rp. 79.100.000,00

Outputs:
Terbinanya KIM

Autcomes:
Bertambahnya pengetahuan KIM

Benefits:
Meningkatnya SDM bidang Informasi

Impacts:
Lancarnya arus informasi antar kelompok

7. Program kerjasama informasi dengan mas media

a). Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inputs:

Rp. 217.400.000,00

Autputs:

Tersebarluasnya informasi

Autcomes:

Sampainya informasi ke masyarakat

Benefits:

Masyarakat menerima informasi

Impacts:

Bertambahnya pengetahuan masyarakat

8. Program pengembangan data dan informasi statistik daerah

a) Penyusunan statistik basis sektor kecamatan

Inputs:

Rp. 63.740.000,00

Autputs:

Data statistik

Autcomes:

Terdatanya potensi kecamatan

Benefits:

Terkumpulnya data informasi daerah

Impacts:

Meningkatnya pengelolaan data informasi

III.b. EVALUASI KINERJA

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas melaksanakan sebanyak 8 (delapan) Program dan 26 Kegiatan. Dari Evaluasi yang dilakukan terhadap indikator keberhasilan masing-masing kegiatan yaitu input, Output dan outcome nya, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas dalam menjalankan program dan kegiatan mencapai hasil yang memadai, hal ini bisa dilihat dari penetapan dan pengukuran kinerja masing-masing program kegiatan dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut:

- Lampiran I Rencana Kegiatan Tahunan
- Lampiran II Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 sudah lebih mengarah terhadap pencapaian visi dan misi serta tanggungjawab dari masing-masing komponen organisasi dan dari segi penganggaran kegiatan telah dilakukan pengefisienan anggaran dari tahun sebelumnya dengan tanpa mengurangi kegiatan yang bertujuan dalam capaian sasaran tahun 2017. Namun disisi lain untuk tahun berikutnya kuantitas anggaran perlu ditingkatkan dalam rangka memperbesar cakupan kegiatan.

III.c. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas memerlukan dukungan pendanaan yang memadai baik untuk pembiayaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.

Posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan program dan kegiatannya memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas dan melakukan pengeluaran untuk berbagai mata anggaran.

Adapun rincian dan realisasi belanja selama Tahun 2017 untuk program dan kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN	JUMLAH DANA DALAM DPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	6	7
1.	Belanja Pegawai	1.171.421.548,00	1.140.693.880,00	30.727.668,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	701.921.548,00	689.193.880,00	12.727.668,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	469.500.000,00	451.500.000,00	18.000.000,00

B. Belanja Langsung

NO	URAIAN	JUMLAH DANA DALAM DPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,246,157,000.00	1,185,448,013.00	60,708,987.00
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,400,000.00	8,398,000.00	2,000.00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	40,200,000.00	22,276,200.00	17,923,800.00
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	94,600,000.00	82,829,530.00	11,770,470.00
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	182,140,000.00	181,195,000.00	945,000.00
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47,000,000.00	46,998,500.00	1,500.00
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,937,000.00	32,930,000.00	7,000.00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	14,997,000.00	3,000.00
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	5,000,000.00	4,995,500.00	4,500.00
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223,000,000.00	202,012,140.00	20,987,860.00
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36,624,000.00	28,820,000.00	7,804,000.00
11.	Penyediaan makanan dan minuman	22,680,000.00	22,324,000.00	356,000.00
12.	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	538,576,000.00	537,672,143.00	903,857.00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216,100,000.00	214,385,000.00	1,715,000.00
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	156,100,000.00	154,635,000.00	1,465,000.00
2.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60,000,000.00	59,750,000.00	250,000.00
3.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	120,000,000.00	119,317,900.00	682,100.00
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	120,000,000.00	119,317,900.00	682,100.00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,187,469,500.00	2,095,177,715.00	92,291,785.00
1.	Operasional Website Pemkab Palas	96,000,000.00	65,089,000.00	30,911,000.00
2.	Pengembangan Jaringan Komunikasi Daerah	906,769,500.00	904,001,600.00	2,767,900.00
3.	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	23,700,000.00	22,259,000.00	1,441,000.00
4.	Survey dan Monitoring Menara Telekomunikasi	135,000,000.00	134,638,000.00	362,000.00
5.	Pembangunan Data Center	876,000,000.00	825,704,500.00	50,295,500.00
6.	Pelatihan Pejabat Penghubung SP4N	150,000,000.00	143,485,615.00	6,514,385.00

NO	URAIAN	JUMLAH DANA DALAM DPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	6	7
6.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	101,000,000.00	100,061,500.00	938,500.00
1.	Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	21,900,000.00	21,762,000.00	138,000.00
2.	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	79,100,000.00	78,299,500.00	800,500.00
7.	Program kerjasama informasi dengan mas media	217,400,000.00	214,380,180.00	3,019,820.00
1.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	217,400,000.00	214,380,180.00	3,019,820.00
8.	Program pengembangan data dan informasi statistik daerah	63,740,000.00	62,924,500.00	815,500.00
1.	Penyusunan statistik basis sektor kecamatan	63,740,000.00	62,924,500.00	815,500.00
JUMLAH		4,159,866,500.00	3,999,694,808.00	160,171,692.00

Dengan demikian presentase pencapaian target sebesar 96,14%.

Dana Sisa Anggaran sebesar Rp. 160.171.692,00 terdiri dari :

- Silva GU	Rp.	71.102.500.00
- Sisa Pagu Anggaran	Rp.	89.069.192.00

Maka dari seluruh anggaran yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun Anggaran 2017 (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 5.987.387.079,00 dapat diperinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Dana Dalam DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	
				Silva (Rp.)	Tidak Diminta Pencairannya
1.	Belanja Tidak Langsung	1.171.421.548,00	1.140.693.880.00	0.00	30.727.668,00
2.	Belanja Langsung	4,159,866,500.00	3,999,694,808.00	71.102.500.00	89.069.192,00
Jumlah		5.987.387.079,00	5.668.019.466.00	71.102.500.00	119.796.860,00

Dengan demikian persentase Realisasi Anggaran sebesar 96,42 %

III.d. PENGUKURAN KINERJA

Untuk Menguraikan Kegiatan Program Pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, dapat digambarkan menurut kegiatan sebagaimana tertera dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (Terlampir/ Formulir PK).

III.e. PENCAPAIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen (Planing, Organizing, Aktuating, Controlling) merupakan suatu proses pencapaian tujuan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas oleh karena itu Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2017 dapat mengartikulasikan dan menyajikan Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Capaian Kinerja, dimana keseluruhan dimensi tersebut diatas merupakan titik akhir dari Pendayagunaan Dana dan Sumber Daya Manusia yang ditopang oleh strategis pelaksanaan yang efisien dan efektif, cakrawala waktu dan motivasi kerja.

Untuk mengetahui pencapaian rencana Kinerja Tahunan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran Formulir RKT).

III.f. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Berdasarkan nilai capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2017 diperoleh nilai capaian sasaran sebesar : 96,42% yang berarti termasuk kategori berhasil dengan standart ukuran yang telah ditetapkan pengukuran pencapaian sasaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2017 merupakan Laporan dari salah satu Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan Analisis Pencapaian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2017 diperoleh nilai capaian kinerja sasaran sebesar 96,42 % yang berarti termasuk kedalam kategori sangat berhasil sesuai dengan standard ukuran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Bukan Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99, Tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kesemuanyamerupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan selesainya LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2017, di harapkan dapat merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.

Dibuat di : Sibuhuan
Tanggal : Desember 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG LAWAS,**

Drs. MARZA JENNOVA, MM
PEMBINA
NIP. 19730209 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan maksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003, Tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Unit Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2017 dan menyampaikannya kepada Bupati Padang Lawas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu system penilaian pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2017 sebagai bahan mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penyusunan laporan ini mengacu dan berpedoman kepada Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2003, namun kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karenanya diharapkan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam melanjutkan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, Desember 2017
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Drs. MARZA JENNOVA, MM
PEMBINA
NIP. 19730209 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	3
II.a. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika	3
II.b. Tujuan dan Sasaran	5
II.c. Strategi dan Kebijakan	6
II.d. Rencana Kerja Tahun 2017	6
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	9
III.a. Indikator Keberhasilan	9
III.b. Evaluasi Kinerja	20
III.c. Pengelolaan Keuangan	20
III.d. Pengukuran Kinerja	22
III.e. Pencapaian Rencana Kinerja Tahunan	23
III.f. Pencapaian Kinerja Sasaran	23
BAB IV : PENUTUP	24
Lampiran-lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. TUJUAN

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai media pertanggungjawaban dari suatu Instansi Pemerintah terhadap pelaksanaan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas serta untuk mencapai Visi maka Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas yakni:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis;
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat;
5. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab;
6. Meningkatkan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan informatika yang handal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 89, tambahan lembaran Negara Nomor: 4741), serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, dan guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta mengacu kepada keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di Tahun 2017 ini kembali menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bertujuan agar kelak dapat tercapainya Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas sehingga terwujudkannya aspirasi masyarakat dan cita-cita Bangsa dan Negara.

2. SASARAN

Pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.126.833.227,30 namun sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 03 tanggal 20 Desember 2017, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, berubah menjadi Rp. 5.331.288.048,00 berarti bertambah sebesar Rp. 1.204.454.820,70 atau 29,19%, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Dana Dalam DPA sebelum Perubahan	Jumlah Dana Dalam DPA setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4		5
1.	Belanja Tidak Langsung	1.742.830.727,30	1.171.421.548,00	(571.409.179,30)	(32,79)
2.	Belanja Langsung	2.384.002.500,00	4.159.866.500,00	1.775.864.000,00	74.49
Jumlah		4.126.833.227,30	5.331.288.048,00	1.204.454.820,70	29,19

Melihat dari anggaran yang tersedia, untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas, maka sasaran utama yang akan dilaksanakan adalah:

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Terlaksananya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
7. Terlaksananya kerjasama informasi dengan mas media
8. Terlaksananya pengembangan data dan informasi statistik daerah

3. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor: 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor: 18 Tahun 2011, Tanggal 08 November 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Pembentukan Badan, Kantor dan Satuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017,

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas serta Struktural Organisasi yang ada (Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk Tahun 2017 terdiri dari:

1. Kepala Dinas	1 Orang
a. Sekretaris	1 Orang
- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 Orang
- Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	1 Orang
- Kepala Seksi Informasi Publik	1 Orang
- Kepala Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik	1 Orang
- Kepala Seksi Telekomunikasi	1 Orang
c. Kepala Bidang E-Government	1 Orang
- Kepala Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi	1 Orang
- Kepala Seksi Pemberdayaan Aplikasi	1 Orang
- Kepala Seksi Keamanan Informasi	1 Orang
d. Kepala Bidang Persandian dan Statistik	1 Orang
- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	1 Orang
e. Staf	
- Bendahara Pengeluaran	1 Orang
- Bendahara Penerimaan	1 Orang

Beberapa Kasi. dan Kasubbag. saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas sehingga mengakibatkan Lemahnya tanggungjawab atas tugas-tugas yang dibebankan.

4. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH

Sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2017, belum direalisasikannya secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Oerorganisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor : 89, tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741), serta belum terisinya jabatan struktural oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sehingga langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah antara lain :

- a. Memanfaatkan/ mengkondisikan personil yang ada
- b. Menyesuaikan Anggaran dengan kondisi yang ada.
- c. Memanfaatkan/ mengkondisikan personil tenaga kerja suka rela (TKS).